

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Implementasi PP No 82 Tahun 2019 pada Peserta BPJS Ketenagakerjaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Samarinda

Determinant Factors Affecting the Implementation of Government Regulation No. 82 of 2019 in BPJS Ketenagakerjaan Participants in the Micro, Small, and Medium Enterprise Sector in Samarinda

Abdi Musra^{1*}, Ma'mun Sarma^{2#}, Sudradjat^{3#}

¹Program Magister Pengembangan Industri Kecil Menengah, Sekolah Pascasarjana IPB

Jl. Raya Pajajaran Kampus IPB Baranangsiang Bogor 16144

²Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB

Jl. Agatis, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680

³Departemen Agronomi dan Holtikultura, Fakultas Pertanian, IPB

Jl. Kamper, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680

Diterima: 6 Januari 2025; Direvisi: 7 Agustus 2025; Disetujui: 28 Agustus 2025

ABSTRAK

Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2019 yang mengatur tentang kenaikan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) tanpa adanya kenaikan iuran, sehingga PP tersebut diindikasikan memengaruhi peningkatan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian bertujuan untuk menganalisis faktor – faktor yang berpengaruh dalam implementasi PP No 82 Tahun 2019, menganalisis persepsi UMKM di Kota Samarinda terhadap BPJS Ketenagakerjaan, menganalisis pengaruh PP No 82 Tahun 2019 terhadap UMKM di Kota Samarinda, dan menyusun strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan jumlah peserta UMKM pada BPJS Ketenagakerjaan di Kota Samarinda. Penelitian menggunakan metode campuran yang mengkombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang terdiri atas analisis tren keuangan, analisis SEM PLS, dan analisis SWOT. Responden terdiri atas 22 orang *Account Representative* (AR) BPJS Ketenagakerjaan dan 179 UMKM di Kota Samarinda. Tren keuangan BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Pengetahuan produk karyawan BPJS Ketenagakerjaan berpengaruh dalam implementasi PP tersebut. Peningkatan manfaat program JKK dan JKM berpengaruh dalam meningkatkan *customer engagement* peserta UMKM dan memengaruhi pengambilan keputusan UMKM dalam pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan. Hasil Evaluasi Faktor Internal (IFE), Evaluasi Faktor Eksternal (EFE), dan matriks Internal-Eksternal (IE) menunjukkan BPJS Ketenagakerjaan berada dalam tahap pertumbuhan dan pengembangan. Berdasarkan hal tersebut, pendekatan strategis dirumuskan menggunakan analisis SWOT. Sosialisasi kepada UMKM perlu dilakukan agar program ini dapat diimplementasikan dengan baik dan didukung oleh peraturan tingkat daerah Pemerintah Kota Samarinda.

Kata kunci: BPJS Ketenagakerjaan, customer engagement, pengetahuan produk, SWOT, UMKM

ABSTRACT

The Government of the Republic of Indonesia enacted Government Regulation (PP) No. 82 of 2019 concerning the Implementation of the Employment Injury Security Program (JKK) and the Death Security Program (JKM). This regulation addresses the enhancement of benefits provided by both programs without an increase in contribution rates, which is indicated to have influenced the growth in BPJS Ketenagakerjaan participants. This study aims to analyze the factors affecting the implementation of PP No. 82 of 2019, examine the perceptions of BPJS Ketenagakerjaan participants among UMKM in Samarinda City, assess the impact of the regulation on UMKM, and formulate strategies to increase UMKM participation in BPJS Ketenagakerjaan in Samarinda. This research employs a mixed-method approach, combining qualitative

*) Korespondensi:

Perumahan Pemuda Permai, Selat Tengah, Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah; email: musraabdi@gmail.com

and quantitative methods, including financial trend analysis, Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM), and SWOT analysis. Respondents consisted of 22 BPJS Ketenagakerjaan Account Representatives (AR) in East Kalimantan and 179 UMKM in Samarinda City. The financial trend of BPJS Ketenagakerjaan has shown positive growth over the years. Adequate product knowledge among BPJS Ketenagakerjaan employees is essential for the effective implementation of this regulation. The increase in program benefits has contributed to enhanced customer engagement of UMKM and has influenced decision-making of UMKM regarding BPJS Ketenagakerjaan registration. The results of the Internal Factor Evaluation (IFE), External Factor Evaluation (EFE), and Internal-External (IE) matrix indicate that BPJS Ketenagakerjaan is currently in the growth and development phase. Based on these findings, a strategic approach was formulated using SWOT analysis. Program sustainability in the UMKM sector depends on effective dissemination strategies and the establishment of supportive local regulations, particularly those enacted by municipal authorities such as the Samarinda City Government.

Key words: BPJS Ketenagakerjaan, customer engagement, product knowledge, SWOT, UMKM

PENDAHULUAN

Pemerintah mengeluarkan peraturan tentang penambahan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 82 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Peraturan ini merupakan perubahan atas PP No 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Terdapat peningkatan manfaat untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Peningkatan ini berupa peningkatan santunan dan kenaikan manfaat beasiswa anak. Total santunan kematian yang sebelumnya sejumlah Rp24 juta, naik menjadi Rp42 juta, santunan kecelakaan kerja ada peningkatan di biaya angkut, santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB), dan layanan medis lainnya. Kenaikan manfaat ini tanpa adanya kenaikan iuran. PP No 44 Tahun 2015 menyebutkan bahwa setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan tenaga kerjanya sebagai peserta JKK dan JKM. Jaminan sosial bertujuan untuk memproteksi diri dari masalah ekonomi apabila terjadi sesuatu pada pengguanya (Wahyudi dan Mahyuzar, 2018). JKK dan JKM menjadi bagian dalam perkembangan suatu usaha dan pertumbuhan ekonomi (Mayori dan Nurundana, 2010). Kewajiban ini berlaku untuk setiap skala usaha, mulai dari skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan skala usaha besar. Dimana setiap skala usaha berlaku proses pentahapan kepesertaan.

Setelah adanya pandemi Covid 19 dan dikeluarkannya peraturan pemerintah tentang penambahan manfaat dan program BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2019, dapat dilihat

bahwa terjadi peningkatan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Ada indikasi bahwa peningkatan ini dipengaruhi oleh penambahan manfaat dan program yang telah disahkan oleh pemerintah. Penambahan manfaat ini ditujukan agar adanya peningkatan pelayanan kepada seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Data BPJS Ketenagakerjaan Samarinda menunjukkan sebanyak 3.007 UMKM terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2019. Jumlah ini meningkat pada tahun berikutnya sejumlah 3.275 pada tahun 2020 dan 5.015 pada tahun 2021. Jumlah tersebut menurun menjadi 3.535 pada tahun 2022 dan naik kembali menjadi 4.380 pada tahun 2023.

Proses bisnis BPJS Ketenagakerjaan meliputi proses inti dan proses pendukung, serta interaksi dengan berbagai pihak. Proses inti mencakup pengelolaan kepesertaan dan hubungan antar lembaga, investasi dana kelola, serta pelayanan dan pengaduan. Proses pendukung mencakup pengelolaan keuangan, sumber daya manusia dan umum, teknologi informasi serta tata kelola BPJS Ketenagakerjaan. Interaksi dengan pihak berkepentingan yakni lembaga pemerintahan terkait, tenaga kerja, perusahaan, perbankan, serta mitra untuk pemberian manfaat tambahan (Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan, 2021).

Interaksi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan pemerintah dapat dilihat dari dikeluarkannya beberapa peraturan di tingkat pusat ataupun daerah. Namun, peraturan tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik, khususnya ditingkat daerah. Hal ini dapat dilihat dari implementasi kewajiban program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pelaku UMKM dan usaha besar. Masih terdapat pelaku usaha yang

dikategorikan tidak patuh sesuai dengan pentahapan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Penetapan Provinsi Kalimantan Timur sebagai daerah untuk IKN dan pengesahan PP No 82 Tahun 2019 dilakukan dalam waktu yang berdekatan. Oleh karena itu, kesiapan Provinsi Kalimantan Timur juga harus dilihat salah satunya dalam pelaksanaan program jaminan sosial yang menjadi bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP) khususnya di Kota Samarinda sebagai ibu kota Kalimantan Timur. Pelaksanaan program ini dapat dilihat dari implementasi program BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berjalan di Kota Samarinda termasuk implementasi program tersebut pada UMKM yang ada di Kota Samarinda.

Tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi PP No 82 Tahun 2019 di Kota Samarinda; (2) menganalisis persepsi UMKM di Kota Samarinda terhadap BPJS Ketenagakerjaan; (3) menganalisis pengaruh PP No 82 Tahun 2019 terhadap UMKM di Kota Samarinda; dan (4) menyusun strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan jumlah peserta UMKM pada BPJS Ketenagakerjaan di Kota Samarinda.

METODE PENELITIAN

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari kuesioner dan wawancara kepada internal dan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Data sekunder bersumber dari dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan kumpulan regulasi pemerintah daerah, serta didukung oleh data literatur, jurnal ilmiah, dan data hasil penelitian yang sejenis sebelumnya.

Responden pada analisis SEM-PLS terdiri atas seluruh *Account Representative* (AR) BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Timur yang berjumlah 22 orang dan UMKM peserta BPJS Ketenagakerjaan Samarinda. Pemilihan AR didasarkan pada tugas AR dalam perluasan dan pembinaan peserta BPJS Ketenagakerjaan (Mahfudz, 2021). UMKM yang dipilih dikelompokkan menjadi dua yaitu UMKM yang mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Samarinda sebelum dan sesudah disahkannya PP No 82 Tahun 2019. Pengelompokan skala usaha ini ditentukan dari aset dan omset tahunan UMKM tersebut. Penentuan UMKM menggunakan metode *stratified random sampling* dari jumlah populasi 4.380 UMKM yang terdaftar BPJS

Ketenagakerjaan di Kota Samarinda dan diperoleh sebanyak 179 responden UMKM. Responden pada analisis matriks IFE, EFE, IE dan SWOT berjumlah enam orang yang terdiri atas satu orang internal BPJS Ketenagakerjaan, satu orang perwakilan pemerintah yaitu Dinas Koperasi, dan UMKM Samarinda, dan empat orang dari UMKM di Kota Samarinda. Narasumber pada penelitian ini dipilih dengan sengaja (*purposive sampling*), yaitu pemilihan pakar yang kompeten dan terlibat langsung dalam pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan. Penetapan narasumber sebagai seorang pakar berdasarkan pada (1) reputasi, kedudukan dan kredibilitasnya menurut topik kajian; dan/atau (2) memiliki pengalaman minimal 10 tahun di bidang yang ditekuni.

Pengolahan data dilakukan dengan program SmartPLS4 dan MS Office Excel. Aplikasi SmartPLS4 digunakan untuk melihat pengaruh *product knowledge* karyawan BPJS Ketenagakerjaan terhadap PP No 82 Tahun 2019, serta melihat pengaruh PP No 82 Tahun 2019 terhadap keputusan pembelian/mendaftar dan *customer engagement* peserta BPJS Ketenagakerjaan. Aplikasi MS Office excel digunakan untuk analisis matriks IFE, EFE, IE, dan SWOT. Hasil analisis tersebut dikembangkan menjadi beberapa alternatif strategi yang dapat diterapkan dalam implementasi PP No 82 Tahun 2019 di Kota Samarinda.

Structural Equation Model (SEM) – Patial Least Square (PLS)

Teknik analisis SEM – PLS digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel yang terdiri dari dua tahapan yaitu *outer model* dan *inner model*. Analisis *outer model* dilakukan untuk mengevaluasi validitas dan reliabilitas dari pengukuran indikator dengan menggunakan validitas konvergen, validitas diskriminan, dan uji reliabilitas. Setelah dilakukan analisis *outer model*, maka dilakukan validasi model fit yang parameternya terdisei atas SRMR, d- ULS, d_G, NFI, dan GoF. Analisis *inner model* dilakukan dengan parameter R square dan *path coefficients* yang digunakan untuk menguji hipotesis dan *effect size* dengan menggunakan *f square*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tren Keuangan BPJS Ketenagakerjaan

Perkembangan aset BPJS Ketenagakerjaan, terus menunjukkan perkembangan positif dan telah mencapai angka Rp645.237,32 miliar atau

tumbuh sebesar 13,61% *Year on Year* (YoY) (Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan 2022). Rincian dari aset tersebut berasal dari aset badan sebesar Rp16.468,01 miliar, aset program JKK sebesar Rp55.365,09 miliar, aset program JKM sebesar Rp15.873,65 miliar, aset program JHT sebesar Rp417.954,09 miliar, aset program JP sebesar Rp130.984,72 miliar, dan aset program JKP sebesar Rp 10.590,95 miliar.

Dukungan Pemerintah Kota Samarinda

Pemerintah Kota Samarinda melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2020, dalam pelaksanaannya telah mengeluarkan peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, diantaranya:

1. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur No: 560/2972/B. Kesra/2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Timur
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
3. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 560/11855/2186-IV/B.Kesra tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Timur

Karakteristik Responden

Karakteristik Karyawan BPJS Ketenagakerjaan pada penelitian ini dapat dilihat di Tabel 1. Karakteristik UMKM dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 1. Karakteristik responden karyawan BPJS Ketenagakerjaan di Kalimantan Timur

Karakteristik	Jumlah	Persentase (%)
Masa kerja		
< 5 tahun	2	9
5-10 tahun	15	68
10-15 tahun	4	18
15-20 tahun	1	5
Total	22	100
Jenis Kelamin		
Laki-laki	19	86
Perempuan	3	14
Total	22	100
Pendidikan terakhir		
S1/ sederajat	20	91
S2/S3	2	9
Total	22	100

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2025

Penentuan skala UMKM berdasarkan aset dan omset badan usaha sesuai PP No 7 Tahun 2021.

Sebanyak 55% UMKM yang diteliti terdaftar BPJS Ketenagakerjaan sebelum disahkannya PP No 82 tahun 2019 dan 45% terdaftar setelah PP No 82 Tahun 2019 disahkan. Jumlah usaha skala mikro, kecil dan menengah masing-masing adalah 53%, 35%, dan 12%. Sesuai dengan pentahapan kepesertaan pada Peraturan Presiden (Perpres) No 109 Tahun 2019, UMKM diwajibkan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan skala usaha. Didapatkan hasil sesuai Tabel 3.

Tabel 2. Karakteristik responden karyawan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Samarinda

Karakteristik responden	Jumlah	%
Tahun pendaftaran		
Sebelum disahkannya PP	98	55
Setelah disahkannya PP	81	45
Jenis usaha		
Industri pengolahan	17	9
Jasa	58	32
Konstruksi	23	13
Perdagangan besar dan eceran	58	32
Pertambangan dan penggalan	13	7
Pertanian, kehutanan, dan perikanan	10	6
Jumlah aset (dalam miliar)		
≤ 1	94	53
> 1 - 5	62	35
> 5 - 10	23	13
> 10	0	0
Jumlah omset (dalam miliar)		
≤ 2	108	60
> 2 - 15	49	27
> 15 - 50	14	8
> 50	4	4
Program yang diikuti		
4 program	99	55
3 program	59	33
2 program	21	12
Kepesertaan tenaga kerja (TK)		
Mendaftarkan semua TK	169	94
Tidak mendaftarkan semua TK	10	6

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2025

Tabel 3. Kepesertaan program UMKM sesuai skala

Skala Usaha	2 Program	3 Program	4 Program
Mikro	18	33	43
Kecil	2	22	38
Menengah	1	4	18

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2025

Skala usaha mikro, wajib ikut program JKK dan JKM, skala usaha kecil wajib ikut JKK, JKM, dan JHT, dan skala usaha menengah wajib ikut program JKK, JKM, JHT, dan JP. Penentuan skala usaha ini sesuai dengan PP No 7 Tahun 2021. Dapat dilihat bahwa sebanyak 7 UMKM dari 179

responden dinyatakan belum patuh karena belum mendaftarkan program sesuai dengan skala usaha. Empat persen UMKM dinyatakan sebagai Perusahaan Daftar Sebagian Program (PDS Program). Dilihat dari kewajiban pendaftaran tenaga kerja, 94% UMKM sudah mendaftarkan semua tenaga kerja dan 6% belum mendaftarkan semua tenaga kerja, sehingga 6% UMKM dinyatakan Perusahaan Daftar Sebagian Tenaga Kerja (PDS TK). Hal ini sejalan dengan penelitian Sutrisno (2020) dan Sari (2021) yang menyatakan bahwa masih banyaknya perusahaan yang tidak memberikan hak tenaga kerjanya seperti BPJS Ketenagakerjaan. Ketidapatuhan ini dapat merugikan pekerja dan menimbulkan konsekuensi hukum bagi perusahaan (Lazuardi, 2021).

Pengaruh Kenaikan Manfaat JKK-JKM Terhadap Customer Engagement (CE) UMKM Peserta BPJS Ketenagakerjaan Samarinda

Hasil analisis menunjukkan *R-square* variabel *dependen customer engagement* (CE) sebesar 0,222 sehingga variabilitas CE dapat dijelaskan oleh kenaikan manfaat program (KMP) sebesar 22,2% yang termasuk kategori sedang (Tabel 4).

Tabel 4. *R-square customer engagment*

Variabel	<i>R-square</i>	<i>R-square adjusted</i>
CE	0,222	0,214

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2025

Hasil analisis menunjukkan bahwa kenaikan manfaat program JKK dan JKM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *customer engagement* UMKM peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar sebelum disahkannya PP No 82 Tahun 2019 dengan koefisien parameter sebesar 0,471. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi *P value* sebesar 0,000 (lebih kecil dari alpha 0,05) dan nilai *T-value statistic* sebesar 3,623 (lebih besar dari *T*-tabel sebesar 1,96).

Tabel 5. Uji signifikansi KMP - CE

	<i>Original sample</i>	<i>T statistics</i>	<i>P values</i>	Keterangan
KMP -> CE	0,471	3,623	0	Diterima

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2025

Hasil analisis menunjukkan *effect size* (f) kenaikan manfaat program JKK dan JKM memiliki tingkat pengaruh sedang terhadap *customer engagement* UMKM yang terdaftar sebelum PP No 82 Tahun 2019 disahkan dengan nilai f sebesar

0.285 (Tabel 6), sehingga kenaikan manfaat program tersebut dapat meningkatkan *customer engagement* UMKM.

Tabel 6. *Effect size* KMP - CE

	CE	KMP	Keterangan
CE			
KMP	0,285		Efek Sedang

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2025

Pengaruh Kenaikan Manfaat JKK-JKM Terhadap Keputusan Pendaftaran UMKM Peserta BPJS Ketenagakerjaan Samarinda

Hasil analisis menunjukkan *R-square* variabel *dependen* keputusan pembelian (KP) sebesar 0,230 sehingga variabilitas keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh kenaikan manfaat program sebesar 23% yang termasuk kategori lemah (Tabel 7).

Tabel 7. *R-square* keputusan pembelian

Variabel	<i>R-square</i>	<i>R-square adjusted</i>
KP	0,230	0,221

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2025

Hasil analisis menunjukkan bahwa kenaikan manfaat program JKK dan JKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan UMKM untuk mendaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan koefisien parameter sebesar 0,480 (Tabel 8). Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi *P value* sebesar 0,000 (lebih kecil dari alpha 0,05) dan nilai *T-value statistic* sebesar 4.905 (lebih besar dari *T*-tabel sebesar 1,96).

Tabel 8. Uji signifikansi KMP – KP

	<i>Original sample</i>	<i>T statistics</i>	<i>P values</i>	Keterangan
KMP -> KP	0,480	4,734	0	Diterima

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2025

Hasil analisis menunjukkan *effect size* (f) kenaikan manfaat program JKK dan JKM berpengaruh sedang terhadap keputusan UMKM mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan nilai f sebesar 0.300 (Tabel 9), sehingga kenaikan manfaat program JKK dan JKM berpengaruh dalam pengambilan keputusan bagi UMKM yang mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan setelah PP No 82 Tahun 2019 disahkan.

Kenaikan manfaat JKK dan JKM yang merupakan program dari BPJS Ketenagakerjaan berpengaruh positif terhadap *customer engagement* dan keputusan UMKM untuk mendaftar BPJS

Ketenagakerjaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rajagukguk (2017), yang menyatakan bahwa produk/program, harga, dan promosi pada bauran pemasaran BPJS Ketenagakerjaan di Kota Medan berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen. Hal ini dikarenakan program JKK dan JKM mengalami kenaikan manfaat tanpa adanya kenaikan iuran/harga yang dibebankan kepada peserta.

Tabel 9. *Effect size* KMP - KP

Variabel	KMP	KP	Keterangan
KMP		0,300	Efek sedang
KP			

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2025

Kenaikan manfaat program JKK dan JKM berpengaruh sedang terhadap *customer engagement* dan keputusan UMKM untuk mendaftar BPJS Ketenagakerjaan. Efek sedang ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya menurut penelitian Setiadi (2009) jaminan sosial ketenagakerjaan dan produktivitas kerja memiliki hubungan yang sangat rendah. Zulfa (2018) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa menurut tenaga kerja formal, kecelakaan kerja tidak terjadi pada seluruh tenaga kerja. Adillah (2015) dan Sausan (2024) menyebutkan UMKM belum menyadari pentingnya ikut serta dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Saputra (2022) menyebutkan bahwa faktor penghambat lainnya adalah jaminan sosial ketenagakerjaan dianggap sebagai biaya tambahan sehingga mengurangi keuntungan.

Selain kenaikan manfaat program JKK dan JKM, faktor lain yang ikut berpengaruh dalam pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan adalah pendapatan, tingkat pendidikan, dan usia (Muslim, 2022).

Product Knowledge Karyawan BPJS Ketenagakerjaan

Hasil analisis menunjukkan *R-square* variabel dependen *Product Knowledge* (PK) sebesar 0,641 (Tabel 10), sehingga variabilitas PK dapat dijelaskan oleh kenaikan manfaat program sebesar 64% yang termasuk kategori kuat.

Tabel 10 *R-square product knowledge*

Variabel	R-square	R-square adjusted
PK	0,641	0,623

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2025

Hasil analisis menunjukkan bahwa PK memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam implementasi KMP dengan koefisien parameter sebesar 0,801. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi *P value* sebesar 0,000 (lebih kecil dari alpha 0,05) dan nilai *T-value statistic* sebesar 10.613 (lebih besar dari *T-tabel* sebesar 1,96). Hal ini mengidentifikasi bahwa implementasi PP 82 Tahun 2019 dipengaruhi oleh PK.

Tabel 11. Uji signifikansi PK – KMP

	Original sample	T statistics	P values	Keterangan
PK -> KMP	0,801	10,613	0	Diterima

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2025

Hasil analisis menunjukkan *effect size* (f) PK berpengaruh tinggi dalam implementasi KMP dengan nilai f sebesar 1.789, sehingga kenaikan manfaat program JKK dan JKM harus didukung dengan *product knowledge* karyawan BPJS Ketenagakerjaan.

Tabel 12. *Effect size* KMP - PK

Variabel	KMP	PK	Keterangan
KMP			
PK	1,789		Efek tinggi

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2025

Analisis Matriks IFE

Matriks IFE digunakan untuk menganalisis faktor internal yang berpengaruh dalam implementasi PP No 82 Tahun 2019 di Kota Samarinda yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan. Kekuatan dan kelemahan ini diperoleh dari kuesioner dan wawancara responden, penelitian terdahulu yang terkait dengan topik yang diangkat, dan hasil analisis SEM-PLS. Hasil kekuatan yang diperoleh dari analisis SEM-PLS yaitu kenaikan manfaat program JKK dan JKM tanpa adanya kenaikan iuran berpengaruh positif terhadap *customer engagement* dan keputusan UMKM untuk mendaftar BPJS Ketenagakerjaan.

Kekuatan dengan skor terbesar adalah BPJS Ketenagakerjaan merupakan program jaminan perlindungan sosial resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah (0,68) (Tabel 13). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Novrizal (2017).

Analisis Matriks EFE

Matriks EFE digunakan untuk menganalisis faktor eksternal yang berpengaruh dalam implementasi PP No 82 Tahun 2019 di Kota Samarinda yang berkaitan dengan peluang dan

ancaman. Peluang dan ancaman ini diperoleh dari hasil kuesioner dan wawancara kepada responden dan penelitian terdahulu yang terkait dengan topik yang diangkat (Tabel 14).

Tabel 13. Matriks IFE BPJS Ketenagakerjaan

A. Kekuatan	Bobot (a)	Rating (b)	Skor (axb)
Program jaminan perlindungan sosial resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah	0,17	4,00	0,68
Adanya kenaikan manfaat JKK dan JKM tanpa adanya kenaikan iuran	0,15	4,00	0,59
Kondisi keuangan BPJS Ketenagakerjaan yang stabil	0,13	3,00	0,38
Program JKK dan JKM merupakan perlindungan dasar yang harus dimiliki karena setiap pekerja memiliki risiko kematian dan kecelakaan	0,13	4,00	0,50
Proses bisnis yang jelas	0,10	3,50	0,34
Sub Total A			2,48
B. Kelemahan			
Brand awareness BPJS Ketenagakerjaan masih kalah dibanding BPJS Kesehatan	0,10	2,00	0,21
Informasi terkait penambahan manfaat dan program belum tersebar luas	0,07	2,50	0,17
Banyak anggapan bahwa BPJS Ketenagakerjaan hanya untuk pekerja formal	0,07	2,00	0,13
Iuran perbulan dinilai memberatkan	0,05	2,00	0,09
Kantor cabang yang tidak tersedia di setiap Kabupaten dan Kota	0,05	2,00	0,11
Sub Total B			0,71
TOTAL A+B			3,19

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2025.

Analisis Matriks IE

Hasil analisis matriks IFE dan EFE diperoleh skor faktor internal 3,19 dan skor faktor eksternal 3,11. Nilai tersebut dipetakan pada matriks IE untuk mengetahui strategi yang tepat untuk dijalankan. Didapatkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan berada pada posisi tumbuh dan berkembang sehingga strategi yang diterapkan adalah strategi intensif (pengembangan produk, penetrasi

pasar, dan pengembangan pasar). Matriks IE ditampilkan pada Gambar 1.

Tabel 14. Matriks EFE BPJS Ketenagakerjaan

A. Peluang	Bobot (A)	Rating (B)	Skor (AxB)
Kerja sama mitra di setiap wilayah dalam memperluas informasi dan pendaftaran	0,12	3,00	0,36
Media promosi lain sebagai saluran (<i>Facebook, instagram, tiktok dan E-Commerce</i>)	0,16	4,00	0,66
Kerja sama pemerintah daerah, organisasi masyarakat dan lainnya	0,13	4,00	0,53
Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah	0,11	4,00	0,44
Tokoh yang berpengaruh dalam penyebarluasan informasi	0,09	3,50	0,33
Sub Total A			2,31
B. Ancaman			
Perusahaan tidak mendaftarkan seluruh tenaga kerja	0,10	2,00	0,20
Mitra kerja sama tidak berjalan dengan baik	0,07	2,00	0,15
Masalah sosial ekonomi yang berdampak pada penurunan upah dan tenaga kerja	0,08	2,00	0,16
Program perlindungan swasta	0,08	2,50	0,19
Isu JHT yang hanya bisa diklaim ketika usia 56 tahun	0,05	2,00	0,10
Sub Total B			0,80
TOTAL A+B			3,11

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2025

Analisis Matriks SWOT

Setelah didapatkan nilai IE, dilakukan tahap pemaduan antara kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan di Samarinda. Pada tahap ini, diperoleh strategi yang dapat dilakukan dalam perluasan kepesertaan UMKM dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Samarinda.

		IFE (3,11)		
		Kuat (3,0 - 4,0)	Sedang (2,0 - 2,99)	Lemah (1,0 - 1,99)
EFE (3,19)	Tinggi (3,0 - 4,0)	I	II	III
	Sedang (2,0 - 2,99)	IV	V	VI
	Rendah (1,0 - 1,99)	VII	VIII	IX

Sumber: Pengolahan data, 2025

Gambar 1. Matriks IE BPJS Ketenagakerjaan

Strategi S - O

1. Memperluas mitra kerja sama dengan mitra, pemerintah daerah dan tokoh
2. Pembuatan regulasi tingkat daerah dalam pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan

Strategi W - O

1. Memaksimalkan berbagai macam kanal informasi terkait BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini sejalan dengan penelitian Rahman (2021) yang menyatakan bahwa media televisi, radio, dan internet berpengaruh signifikan terhadap peningkatan peserta BPJS Ketenagakerjaan.
2. Pelaksanaan program bantuan pemerintah daerah dalam perlindungan masyarakat

Strategi S - T

1. Penguatan dasar pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini harus didukung oleh komunikasi antar pelaksana Komunikasi antar pelaksana menentukan keberhasilan program (Zuhad, 2018)
2. Pembaruan informasi terkini terkait BPJS Ketenagakerjaan

Strategi W - T

1. Sosialisasi masif kepada tenaga kerja terkait program BPJS Ketenagakerjaan.

KESIMPULAN

Implementasi PP No 82 Tahun 2019 di Kota Samarinda dipengaruhi oleh faktor internal BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri atas tren keuangan BPJS Ketenagakerjaan dan *product knowledge* AR BPJS Ketenagakerjaan dan faktor eksternal BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri atas UMKM di Kota Samarinda dan Pemerintah Kota Samarinda. Tren keuangan BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan peningkatan dari tahun 2018-2022. *Product knowledge* karyawan BPJS Ketenagakerjaan berpengaruh dalam implementasi PP No 82 Tahun 2019.

Empat persen UMKM dinyatakan belum patuh dalam penahapan program BPJS Ketenagakerjaan. Enam persen UMKM dinyatakan belum patuh dalam pendaftaran tenaga kerja.

Kenaikan manfaat program JKK dan JKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap *customer engagement* UMKM di Kota Samarinda yang terdaftar sebelum disahkannya PP No 82 Tahun 2019. Pengaruhnya masuk dalam kategori sedang. Kenaikan manfaat program JKK dan JKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan UMKM untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kota Samarinda. Pengaruhnya masuk dalam kategori sedang.

Dalam meningkatkan jumlah peserta UMKM pada BPJS Ketenagakerjaan di Kota Samarinda, dapat dilakukan beberapa strategi diantaranya memperluas mitra kerja sama dengan mitra BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur; Pembuatan regulasi tingkat daerah Kota Samarinda; memaksimalkan berbagai macam kanal informasi terkait BPJS Ketenagakerjaan seperti facebook, tiktok dan instagram; pelaksanaan program bantuan pemerintah Kota Samarinda dalam perlindungan UMKM di Kota Samarinda; dan sosialisasi masif kepada UMKM di Kota Samarinda terkait penambahan manfaat program JKK dan JKM. Kesimpulan berisi jawaban dari tujuan penelitian.

Perlu dibentuk peraturan tingkat daerah sebagai bentuk turunan peraturan dari pemerintah pusat. Saat ini, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat belum berjalan maksimal yang dilihat dari terdapat UMKM yang dikategorikan tidak patuh, sehingga peran-serta pemerintah daerah dalam mengeluarkan regulasi terkait kewajiban BPJS Ketenagakerjaan sangat berpengaruh terhadap implementasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pelaku usaha khususnya UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Adillah, SU, S. Anik. 2015. Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan. *Yustisia*, 4(3): 558-580.
- [BPJSTK] BPJS Ketenagakerjaan. 2021. Transformasi Digital untuk Tingkatkan Layanan Unggul. Laporan Terintegrasi 2021. Jakarta: BPJSTK
- [BPJSTK] BPJS Ketenagakerjaan. 2022. Adaptif dan Inovatif untuk Pertumbuhan yang Impresif. Laporan Terintegrasi 2022. Jakarta: BPJSTK
- Lazuardi, M, H. Sulistiyano. 2021. Konsekuensi Hukum Terhadap Perusahaan Yang Belum Mendaftarkan Tenaga Kerjanya Pada Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (Studi di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rungkut). *Jurnal Revolusi Indonesia*. 1(7): 654-671.
- Mahfudz, N. 2021. Desain Model Pengembangan Kompetensi Teknis Praktisi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Menghadapi Pekerjaan Masa Depan [Disertasi]. Bogor. Institut Pertanian Bogor.

- Mayori, Z, VT. Nurundana. 2010. Analisis Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Jumlah Kepesertaan Pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandar Lampung. *Jurnal Manajemen dan Bisnis (JMB)*, 2(1): 36-41.
- Muslim, HY, MF. Abdullah, F. Aksari. 2022. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Pada Pekerja Sektor Formal Kota Probolinggo. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 6(2): 314-324.
- [PERPRES] Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. 2013.
- [PP] Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. 2015.
- [PP] Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 2015.
- [PP] Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. 2019.
- Rahman, W, AA. Gani. 2021. Bauran Media Elektronik Terhadap Peningkatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar. *Jurnal Ekonomi Global*, 1(1): 75-88.
- Rajagukguk, T, H. Cengkiawan, N. Manalu. 2017. Pengaruh Bauran Pemasaran Jasa Terhadap Loyalitas Konsumen Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan. *Jurnal Ilmiah Methonomi, Edisi Khusus Suplemen*: 33-54.
- Saputra, E. 2022. Analisis Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Usaha Mikro dan Kecil. *Cemerlang: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 2(4): 80-94.
- Sari, NO. 2021. Determinan Yang Berpengaruh Terhadap Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Penerima Upah di Indonesia Tahun 2001-2017. *Jurnal Paradigma Multidisipliner (JPM)*, 2(3): 252-264.
- Sausan, VZ, L. Nirawati. 2024. Sosialisasi Manfaat Program BPJS Ketenagakerjaan Guna Tingkatkan Kesadaran Tenaga Kerja UMKM di Surabaya. *Reslaj: Religion Education Sosial Laa Raiba Journal*, 6(6): 2543-2554.
- Setiadi. 2009. Pengaruh upah dan Jaminan Sosial Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan di PT Semarang Makmur Semarang. [Tesis]. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Sutrisno, H. 2020. Pengaruh BPJS Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4(1): 78-84.
- Wahyudi, NM, Mahyuzar. 2018. Strategi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Jumlah Pengguna Jasa Program BPJS Ketenagakerjaan di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 3(3).
- Zuhad, SF. 2018. Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Sektor Publik (Studi Tentang Aspek Penahapan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Universitas Brawijaya Malang). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(1): 980-991.
- Zulfa, AE, IH. Dwimawanti. 2018. Analisis Ki-nerja BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Pemuda Untuk Meningkatkan Perluasan Kepesertaan Sektor Informal. Semarang. Universitas Diponegoro.